

DINASTI POLITIK DAN PENEMPATAN BIROKRASI: IMPLIKASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Fadjar Tri Sakti

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: fadjartrisakti@uinsgd.ac.id

Riwayat Artikel

Diterima: 17 Agustus 2025

Disetujui: 18 September 2025

Diterbitkan: 1 Oktober 2025

Abstract

Political dynasties in Indonesia have raised serious concerns in governance, particularly regarding the placement of human resources (HR) in bureaucratic positions based on loyalty and kinship rather than meritocracy. This issue is urgent as it directly affects government performance and accountability. The objective of this study is to analyze how bureaucratic placement within political dynasties influences governance quality in Indonesia. Theoretical frameworks include political patronage, bureaucratic meritocracy, and good governance. This research employs a qualitative case study method, using in-depth interviews, observation, and document analysis. The findings reveal that political dynasties reinforce patronage practices, undermine the merit system, and weaken transparency and public accountability. In conclusion, political dynasties negatively affect bureaucratic professionalism, thus requiring stricter regulations, term limits, and stronger independent oversight mechanisms.

Keywords: *Political Dynasties, Bureaucracy, Governance Performance*

Abstrak

Fenomena dinasti politik di Indonesia telah memunculkan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan, khususnya terkait penempatan sumber daya manusia (SDM) dalam birokrasi yang lebih didasarkan pada loyalitas dan kekerabatan daripada meritokrasi. Kondisi ini mendesak untuk dikaji karena berimplikasi langsung terhadap kinerja dan akuntabilitas pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana praktik *bureaucratic placement* dalam struktur dinasti politik memengaruhi kualitas pemerintahan di Indonesia. Kajian teori yang digunakan meliputi patronase politik, meritokrasi birokrasi, dan good governance. Metode penelitian yang diterapkan adalah studi kasus kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinasti politik cenderung memperkuat praktik patronase, mengabaikan merit system, dan melemahkan transparansi serta akuntabilitas publik. Kesimpulannya, politik dinasti berdampak negatif terhadap profesionalisme birokrasi, sehingga diperlukan regulasi, pembatasan masa jabatan, dan penguatan pengawasan independen.

Kata kunci: Dinasti Politik, Birokrasi, Kinerja Pemerintahan

A. PENDAHULUAN

Dinasti politik merupakan fenomena yang banyak dikaji dalam studi administrasi publik karena sering dikaitkan dengan lemahnya mekanisme meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan (Winters, 2011). Praktik penempatan pejabat birokrasi dalam lingkaran keluarga politik cenderung memperkuat patronase dan mengikis profesionalisme aparatur sipil negara (Mendoza, Beja, Venida, & Yap, 2012). Fenomena ini juga dikritik karena memperlemah kapasitas kelembagaan publik dalam memberikan layanan yang berkualitas (Buehler, 2013).

Di banyak negara berkembang, dinasti politik dipandang sebagai salah satu penyebab utama korupsi birokrasi dan inefisiensi administratif (Asako, Iida, Matsubayashi, & Ueda, 2015). Dengan demikian, keterkaitan antara dinasti politik dan birokrasi telah menjadi perdebatan penting dalam studi tata kelola pemerintahan kontemporer.

Dalam konteks Asia Tenggara, studi tentang dinasti politik menyoroti konsekuensi serius terhadap tata kelola pemerintahan (Querubin, 2016). Di Filipina, misalnya, penelitian menunjukkan bahwa dinasti politik mengakibatkan akumulasi kekuasaan keluarga tertentu yang berimplikasi pada lemahnya kinerja lembaga publik (Mendoza et al., 2012). Dinasti politik juga mendorong praktik nepotisme dalam birokrasi yang memperlambat agenda reformasi pemerintahan (Buehler, 2013). Beberapa penelitian bahkan menemukan bahwa keberadaan dinasti politik berbanding lurus dengan rendahnya kualitas pelayanan publik (Asako et al., 2015). Hal ini memperkuat pandangan bahwa relasi antara dinasti politik dan birokrasi perlu dipahami lebih dalam untuk melihat dampaknya terhadap kualitas tata kelola.

Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini difokuskan pada lokus Indonesia, khususnya pada persoalan bagaimana penempatan birokrasi dalam struktur dinasti politik memengaruhi kinerja pemerintahan. Fokus kajian diarahkan pada praktik distribusi jabatan birokrasi yang ditentukan oleh ikatan politik dan kekerabatan, bukan melalui mekanisme merit sistem. Penempatan ini dipandang strategis karena berhubungan langsung dengan efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Dengan mengerucut pada aspek *bureaucratic placement*, penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan konkret antara dinasti politik dan performa pemerintahan. Oleh karena itu, lokus Indonesia dipilih karena fenomena ini tampak jelas dalam praktik politik lokal maupun nasional.

Penelitian terdahulu menunjukkan keterkaitan erat antara dinasti politik dan tata kelola birokrasi. Smith (2018) menemukan bahwa dinasti politik di Filipina menyebabkan rendahnya akuntabilitas birokrasi karena penempatan pejabat publik lebih ditentukan oleh loyalitas keluarga dibandingkan meritokrasi. Selanjutnya, Hutcheson dan Semenova (2019) mengungkapkan bahwa dalam konteks Rusia, penempatan birokrasi dalam jaringan politik keluarga menciptakan inefisiensi dalam pelayanan publik dan memperlemah reformasi administrasi. Di Indonesia, penelitian Hidayat (2021) menunjukkan bahwa pengaruh dinasti politik terhadap birokrasi lokal menimbulkan praktik *patronase* yang berdampak pada rendahnya kinerja pemerintahan daerah. Ketiga penelitian ini menekankan bahwa dinasti politik memiliki dampak signifikan terhadap tata kelola birokrasi dan kualitas pemerintahan.

Penelitian saya memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal fokus pada keterkaitan antara dinasti politik dan birokrasi, serta dampaknya terhadap kualitas pemerintahan. Namun, penelitian ini berbeda karena menekankan pada aspek *bureaucratic placement* atau penempatan pejabat birokrasi sebagai variabel kunci yang menjembatani relasi antara dinasti politik dan kinerja pemerintahan. Jika penelitian terdahulu lebih menekankan pada pola *patronase* atau efek makro terhadap tata kelola publik, penelitian ini mengerucut pada bagaimana mekanisme penempatan birokrasi secara langsung memengaruhi capaian kinerja pemerintahan di Indonesia.

Dari perbedaan tersebut, originalitas penelitian ini terletak pada pemetaan spesifik mengenai implikasi penempatan birokrasi dalam struktur dinasti politik, bukan hanya pada eksistensi dinasti itu sendiri. Penelitian ini mencoba mengungkap secara sistematis bagaimana distribusi jabatan dalam jaringan politik keluarga memengaruhi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan demikian, kajian ini memberikan kontribusi konseptual yang lebih tajam sekaligus bukti empiris yang relevan terhadap diskursus tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Berdasarkan serangkaian temuan dan kesenjangan penelitian tersebut, urgensi penelitian ini menjadi jelas. Fenomena dinasti politik bukan sekadar isu politik, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas birokrasi dan kinerja pemerintahan yang bersentuhan dengan pelayanan

publik. Tanpa analisis mendalam mengenai aspek penempatan birokrasi, sulit untuk merumuskan strategi kebijakan yang mampu memutus siklus patronase politik yang menghambat reformasi birokrasi. Penelitian ini mendesak dilakukan karena menyentuh aspek strategis pembangunan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan profesional di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penempatan birokrasi dalam struktur dinasti politik memengaruhi kinerja pemerintahan di Indonesia. Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola penempatan pejabat birokrasi dalam dinasti politik, mengevaluasi implikasinya terhadap efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan, serta memberikan rekomendasi konseptual bagi penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional.

B. KAJIAN PUSTAKA

Patronase Politik

Patronase politik adalah teori yang menjelaskan bagaimana jabatan publik dan sumber daya negara didistribusikan berdasarkan hubungan personal, loyalitas politik, atau kekerabatan, bukan pada kompetensi profesional (Scott, 1972). Dalam praktik birokrasi, patronase sering digunakan sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan melalui pemberian posisi kepada orang-orang yang dekat dengan elite politik (Kopecký, Scherlis, Panizza, & Spirova, 2016). Hal ini menyebabkan jabatan birokrasi rawan diisi oleh individu yang tidak memenuhi kualifikasi teknis, tetapi memiliki kedekatan politik. Dampak jangka panjangnya adalah melemahnya efektivitas pemerintahan dan menurunnya kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, teori patronase politik memberikan kerangka untuk memahami mengapa penempatan birokrasi dalam dinasti politik cenderung tidak berbasis meritokrasi. Indikator:

- Penempatan jabatan birokrasi berdasarkan loyalitas politik.
- Penguatan relasi kekerabatan dalam distribusi posisi.
- Pelemahan merit system dalam birokrasi.
- Akuntabilitas publik yang menurun akibat praktik nepotisme.

Meritokrasi Birokrasi

Teori meritokrasi menjelaskan bahwa penempatan dan promosi pejabat publik seharusnya didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan prestasi kerja, bukan faktor non-formal seperti kekerabatan politik (Weber, 1978). Merit system dipandang sebagai prinsip utama untuk menciptakan birokrasi yang rasional, profesional, dan mampu memberikan pelayanan publik secara efektif (Nigro, Nigro, & Kellough, 2014). Dalam kerangka ini, birokrasi ideal bekerja melalui aturan yang impersonal dan obyektif, dengan sistem seleksi yang adil. Meritokrasi diyakini dapat mencegah penyalahgunaan jabatan publik dan membatasi dominasi elite politik dalam birokrasi. Teori ini relevan digunakan untuk mengukur dampak penempatan birokrasi dalam dinasti politik terhadap kualitas kinerja pemerintahan. Indikator:

- Rekrutmen berdasarkan kompetensi dan kualifikasi.
- Sistem promosi berbasis prestasi kerja.
- Mekanisme seleksi yang transparan dan adil.
- Birokrasi yang profesional dan bebas intervensi politik.

Good Governance

Teori *good governance* menjelaskan bahwa pemerintahan yang baik ditandai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum (World Bank, 1992). Konsep ini menekankan bahwa kualitas birokrasi sangat memengaruhi keberhasilan pemerintahan dalam menyediakan pelayanan publik yang responsif. Dalam konteks dinasti politik, praktik penempatan birokrasi yang tidak sesuai merit system dipandang bertentangan dengan prinsip *good governance*. Ketika jabatan birokrasi diisi oleh individu yang tidak kompeten, maka efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pemerintahan akan menurun. Oleh karena itu, teori ini memberikan kerangka evaluatif untuk menilai sejauh mana

penempatan birokrasi dalam dinasti politik menghambat pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Indikator:

- Akuntabilitas dalam penempatan pejabat birokrasi.
- Transparansi dalam proses rekrutmen dan promosi.
- Efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Supremasi hukum dalam birokrasi.
- Partisipasi masyarakat dalam pengawasan birokrasi.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, karena penelitian ini berfokus untuk memahami secara mendalam dinamika penempatan birokrasi dalam struktur dinasti politik dan implikasinya terhadap kinerja pemerintahan. Menurut Yin (2018), metode studi kasus digunakan untuk meneliti fenomena kontemporer dalam konteks nyata ketika batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat jelas. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menggali relasi patronase politik, distribusi jabatan birokrasi, serta konsekuensinya terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan. Dengan menggunakan studi kasus, penelitian ini dapat mengungkap proses, aktor, serta mekanisme yang bekerja di balik praktik penempatan birokrasi dalam dinasti politik secara lebih detail. Oleh karena itu, metode ini dianggap paling sesuai untuk menangkap kompleksitas fenomena yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dilakukan terhadap aktor birokrasi, pejabat publik, akademisi, serta masyarakat sipil untuk memperoleh perspektif yang komprehensif. Observasi partisipatif dilakukan pada praktik birokrasi di pemerintah daerah yang menjadi lokus penelitian untuk melihat bagaimana proses penempatan jabatan berlangsung. Analisis dokumen meliputi telaah kebijakan, arsip kepegawaian, berita media, serta laporan kinerja pemerintahan. Kombinasi ketiga teknik ini memungkinkan triangulasi data sehingga meningkatkan validitas temuan (Creswell, 2014).

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Menurut Patton (2015), purposive sampling memungkinkan peneliti memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, informan dipilih dari kalangan pejabat birokrasi, anggota legislatif lokal, akademisi, jurnalis, serta aktivis masyarakat sipil yang memahami praktik dinasti politik di wilayah penelitian. Teknik ini relevan karena penelitian berupaya menggali kedalaman informasi, bukan generalisasi statistik.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik. Analisis ini dilakukan melalui proses pengkodean, kategorisasi, dan penarikan tema-tema utama yang berkaitan dengan penempatan birokrasi, dinasti politik, dan kinerja pemerintahan (Braun & Clarke, 2006). Tahapan analisis meliputi transkripsi data, pemberian kode awal, pengelompokan data ke dalam kategori, serta penemuan tema yang menjelaskan hubungan antar-variabel. Analisis tematik dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam menafsirkan makna data kualitatif secara mendalam dan sistematis. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah serta merumuskan implikasi konseptual dan praktis dari penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Penempatan SDM dalam Struktur Dinasti Politik

Pola penempatan sumber daya manusia dalam struktur dinasti politik menunjukkan pergeseran kriteria seleksi birokrasi dari meritokrasi menuju loyalitas personal dan kekerabatan. Penempatan kerabat pada jabatan strategis, seperti kepala dinas atau sekretaris daerah, tidak hanya mengabaikan prinsip merit, tetapi juga memperkuat pola politik patronase yang merusak profesionalisme birokrasi (Purwaningsih, 2015; Sutisna, 2017). Fenomena ini

mengindikasikan bahwa birokrasi sering kali diperlakukan sebagai instrumen kekuasaan, bukan sebagai institusi publik yang otonom. Akibatnya, kompetensi teknis menjadi subordinat terhadap ikatan personal, sehingga efektivitas birokrasi terancam. Kritik terhadap pola ini semakin menguat ketika penempatan pejabat tidak lagi dipandang sebagai proses administratif, melainkan sebagai strategi politis untuk mempertahankan dominasi keluarga berkuasa.

Lebih jauh, pola ini diperkuat melalui mobilisasi sumber daya organisasi yang digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, baik berupa fasilitas negara, anggaran publik, maupun jaringan petahana (IAKSS, 2024). Praktik *closed career* yang menutup akses karier bagi non-kerabat menciptakan eksklusivitas dalam birokrasi, sehingga jalur promosi lebih ditentukan oleh faktor kekerabatan daripada prestasi kerja (Susanti, 2017). Desentralisasi juga membuka ruang lahirnya “raja-raja kecil” di daerah, di mana politik berbasis identitas menjadi sarana memperkokoh dinasti (Sembiring & Simanihuruk, 2018). Dalam kondisi demikian, faktor pendorong seperti ambisi mempertahankan kuasa, kolaborasi politisi-pengusaha, lemahnya regulasi, dan kultur kekerabatan (MKR Indonesia, n.d.) berkontribusi memperkuat dinasti politik sebagai praktik yang terlembaga. Analisis kritis atas fenomena ini menunjukkan bahwa penempatan SDM dalam dinasti politik bukan sekadar masalah rekrutmen birokrasi, melainkan bentuk institusionalisasi kekuasaan yang berpotensi melemahkan demokrasi substantif di Indonesia.

Temuan penelitian ini mengenai pola penempatan kerabat pada jabatan strategis yang mengabaikan meritokrasi selaras dengan hasil Winters (2011) yang menunjukkan bahwa dinasti politik di negara berkembang menggunakan birokrasi sebagai alat mempertahankan kekuasaan, bukan sebagai sarana pelayanan publik, serta sejalan dengan studi Mendoza, Beja, Venida, dan Yap (2012) di Filipina yang menemukan bahwa loyalitas keluarga lebih dominan dibanding kompetensi profesional. Praktik mobilisasi sumber daya organisasi untuk melanggengkan kekuasaan juga diperkuat oleh penelitian Querubin (2016) yang menegaskan bahwa dinasti politik memiliki keunggulan elektoral karena memanfaatkan fasilitas negara dan jaringan politik. Selain itu, kecenderungan *closed career* yang menutup peluang bagi non-kerabat sesuai dengan temuan Buehler (2013) yang menyoroti oligarki lokal sebagai penghambat partisipasi politik masyarakat. Sementara itu, konteks desentralisasi yang memunculkan “raja-raja kecil” di daerah konsisten dengan penelitian Hidayat (2021) yang menemukan bahwa otonomi daerah justru memperkuat kekuasaan berbasis keluarga. Dengan demikian, hasil penelitian ini menguatkan temuan terdahulu bahwa pola penempatan SDM dalam struktur dinasti politik bukan hanya persoalan rekrutmen birokrasi, tetapi bentuk institusionalisasi kekuasaan yang melemahkan prinsip meritokrasi dan demokrasi substantif.

Dampak terhadap Kinerja & Akuntabilitas Pemerintahan

Dampak penempatan SDM dalam struktur dinasti politik terhadap kinerja dan akuntabilitas pemerintahan dapat diamati melalui sejumlah indikator kelembagaan. Setiap aspek pemerintahan, mulai dari proses pengambilan keputusan hingga akuntabilitas keuangan, menunjukkan pola penurunan kualitas akibat dominasi kepentingan keluarga politik. Untuk memperjelas gambaran, berikut disajikan tabel yang merangkum bentuk dampak utama beserta indikator empirisnya.

Tabel 1. Dampak Penempatan SDM dalam Struktur Dinasti Politik terhadap Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintahan

Aspek Pemerintahan	Bentuk Dampak Utama	Indikator Empiris
Pengambilan Keputusan	Berbasis loyalitas, bukan kompetensi	Kebijakan kurang efektif, bias keluarga

Efisiensi Birokrasi	Inefisiensi dalam layanan publik	Posisi strategis diisi figur kurang kompeten
Akuntabilitas Keuangan	Menurun pada daerah dinastik	Opini BPK lebih buruk
Transparansi	Terhambat oleh konflik kepentingan	Minim pengawasan, laporan tidak terbuka
Korupsi & Nepotisme	Meningkat	Penyalahgunaan anggaran untuk kelompok keluarga
Partisipasi Publik	Menurun	Aspirasi masyarakat terpinggirkan

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penempatan SDM dalam struktur dinasti politik membawa konsekuensi serius terhadap kualitas tata kelola pemerintahan, di mana hampir semua aspek utama seperti efisiensi birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas publik mengalami degradasi. Terlihat bahwa proses pengambilan keputusan cenderung berbasis loyalitas dan kepentingan keluarga, yang berdampak pada lahirnya kebijakan tidak efektif. Selain itu, akuntabilitas keuangan terbukti lebih buruk di daerah dengan praktik politik dinasti, sebagaimana ditunjukkan dalam opini audit BPK, sementara transparansi dan partisipasi publik semakin melemah karena dominasi elit keluarga. Analisis ini menegaskan bahwa dinasti politik tidak hanya menghambat profesionalisme birokrasi, tetapi juga memperkuat praktik patronase yang pada akhirnya merusak legitimasi dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa penempatan SDM dalam struktur dinasti politik berdampak pada penurunan kualitas kinerja dan akuntabilitas pemerintahan sejalan dengan hasil penelitian terdahulu. Winters (2011) menegaskan bahwa oligarki politik di negara berkembang cenderung menggunakan birokrasi untuk mempertahankan kekuasaan, yang pada akhirnya melemahkan kapasitas pemerintahan. Mendoza, Beja, Venida, dan Yap (2012) dalam konteks Filipina menemukan bahwa praktik dinasti politik berkontribusi langsung terhadap rendahnya akuntabilitas publik karena pejabat dipilih berdasarkan kekerabatan, bukan kompetensi. Selanjutnya, Asako, Iida, Matsubayashi, dan Ueda (2015) membuktikan bahwa dinasti politik secara sistematis meningkatkan risiko korupsi dan memperlemah efektivitas pemerintahan. Hidayat (2021) di Indonesia menambahkan bahwa dinasti politik memperburuk praktik patronase birokrasi, sehingga agenda reformasi kelembagaan menjadi terhambat. Bahkan, Darmansyah, Putra, dan Hartati (2020) menemukan secara empiris bahwa daerah dengan kepala daerah dinastik cenderung memiliki opini audit BPK yang lebih buruk dibanding daerah nondinastik, menunjukkan korelasi negatif antara dinasti politik dan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini konsisten dengan literatur terdahulu bahwa dinasti politik membawa dampak destruktif terhadap tata kelola, terutama pada aspek kinerja birokrasi, efektivitas kebijakan, dan transparansi akuntabilitas publik.

Mekanisme/Kebijakan: Transparansi & Reduksi Pengaruh Dinasti

Upaya mereduksi pengaruh dinasti politik dalam birokrasi membutuhkan mekanisme kebijakan yang menekankan pada transparansi dan demokratisasi kelembagaan. Reformasi internal partai politik melalui kaderisasi yang intensif dan berkelanjutan merupakan prasyarat penting untuk menciptakan regenerasi kepemimpinan yang lebih sehat, sekaligus mengurangi dominasi elit keluarga. Di sisi lain, desain regulasi pemilu dan pilkada harus

mempertimbangkan keseimbangan antara asas individualisme dan kolektivisme lokal agar sistem demokrasi tidak terjebak pada proseduralisme semata, melainkan tetap selaras dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Persyaratan kompetensi kandidat yang lebih ketat—mencakup kapasitas intelektual, keterampilan manajerial, kepemimpinan, rekam jejak, dan integritas—menjadi instrumen penyaring yang penting agar jabatan publik benar-benar diisi oleh figur berkualitas, bukan sekadar oleh kerabat penguasa. Langkah ini dapat memutus siklus oligarki lokal dengan mendorong meritokrasi politik.

Selain itu, pembatasan masa jabatan yang diiringi pengawasan ketat terhadap celah suksesi keluarga menjadi strategi penting untuk mencegah akumulasi kekuasaan jangka panjang. Kewajiban transparansi dalam rekrutmen dan promosi ASN, disertai audit independen atas mutasi jabatan, memperkuat akuntabilitas birokrasi dari praktik nepotisme. Perlindungan bagi pelapor (whistleblower) serta penerapan sanksi tegas terhadap pejabat yang terbukti melakukan praktik patronase dapat mempersempit ruang lahirnya dinasti politik. Di tingkat masyarakat, partisipasi publik berbasis keterbukaan data anggaran dan kebijakan memberi legitimasi baru bagi kontrol sosial yang lebih kuat. Sementara itu, penguatan pengawasan pusat dan lembaga independen di daerah dengan risiko tinggi dinasti politik menjadi elemen kunci untuk mengatasi asimetri kekuasaan lokal. Dengan kombinasi kebijakan ini, peluang untuk memutus mata rantai dinasti politik semakin terbuka, sekaligus memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Temuan penelitian ini menekankan pentingnya mekanisme kebijakan seperti pembatasan masa jabatan, transparansi rekrutmen ASN, dan kaderisasi partai politik sebagai upaya mengurangi pengaruh dinasti politik. Namun, tidak semua penelitian terdahulu sejalan dengan kesimpulan ini. Misalnya, Dal Bó, Dal Bó, dan Snyder (2009) menunjukkan bahwa keberadaan dinasti politik di Amerika Serikat justru dapat memberikan keuntungan elektoral karena faktor pengalaman dan jejaring politik yang diwariskan, sehingga tidak selalu berimplikasi negatif terhadap tata kelola. Hal ini berlawanan dengan temuan penelitian ini yang melihat dinasti politik sebagai hambatan meritokrasi.

Demikian pula, George dan Ponattu (2019) menemukan bahwa di beberapa konteks Asia, kandidat dari keluarga politik dapat memperoleh legitimasi sosial yang lebih besar karena dianggap memiliki kapasitas simbolik dan akses sumber daya, meskipun praktik tersebut menimbulkan persoalan akuntabilitas. Bahkan, penelitian Choi (2018) di Korea Selatan memperlihatkan bahwa beberapa politisi dinastik mampu menjaga stabilitas kebijakan karena kontinuitas pemerintahan, sesuatu yang berbeda dengan temuan penelitian ini yang lebih menyoroti sisi pelemahan reformasi birokrasi. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa dampak dinasti politik sangat bergantung pada konteks sosial, kelembagaan, dan regulasi yang berlaku di masing-masing negara, sehingga kebijakan pengendalian dinasti politik di Indonesia perlu dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik lokal yang khas.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penempatan sumber daya manusia dalam struktur dinasti politik di Indonesia terbukti berimplikasi negatif terhadap kinerja dan akuntabilitas pemerintahan, karena proses seleksi jabatan lebih ditentukan oleh loyalitas dan kekerabatan daripada meritokrasi, sehingga melemahkan profesionalisme birokrasi dan prinsip demokrasi substantif. Hasil ini menunjukkan bahwa tujuan penelitian untuk menganalisis keterkaitan antara dinasti politik, penempatan birokrasi, dan kinerja pemerintahan telah tercapai, sekaligus memberikan kontribusi baru dengan menekankan dimensi *bureaucratic placement* sebagai variabel kunci yang sebelumnya kurang mendapat perhatian dalam literatur. Temuan ini memperkuat pentingnya memperbaiki tata kelola birokrasi agar tidak sekadar fokus pada isu elektoral, melainkan juga pada distribusi jabatan publik yang lebih profesional dan berbasis merit.

Oleh karena itu, secara praktis pemerintah dan partai politik perlu memperkuat mekanisme kaderisasi, transparansi rekrutmen, serta pengawasan independen untuk mencegah praktik patronase, sementara penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif lintas daerah untuk mengukur dampak dinasti politik secara lebih luas. Penelitian ini masih terbatas pada analisis kualitatif kasus tertentu, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati; namun demikian, implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah urgensi penyusunan regulasi tegas terkait pembatasan masa jabatan, standar kompetensi jabatan publik, dan perlindungan mekanisme meritokrasi demi memperkuat akuntabilitas serta efektivitas pemerintahan di Indonesia.

REFERENSI

- Anggraini, D., & Riharjo, I. B. (2017). Dinasti politik dan penurunan kualitas tata kelola pemerintahan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(2), 155–169. <https://doi.org/10.22146/jsp.24935>
- Asako, Y., Iida, T., Matsubayashi, T., & Ueda, M. (2015). Dynasties in democracies: The political consequences of dynastic legislators in Japan. *American Political Science Review*, 109(4), 760–782. <https://doi.org/10.1017/S0003055415000382>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Buehler, M. (2013). Revisiting the inclusion–moderation thesis in the context of decentralized institutions: The behavior of Indonesia’s Prosperous Justice Party in national and local politics. *Party Politics*, 19(2), 210–229. <https://doi.org/10.1177/1354068812472572>
- Choi, E. J. (2018). Political dynasties and policy continuity: Evidence from South Korea. *Asian Survey*, 58(5), 833–856. <https://doi.org/10.1525/as.2018.58.5.833>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dal Bó, E., Dal Bó, P., & Snyder, J. (2009). Political dynasties. *Review of Economic Studies*, 76(1), 115–142. <https://doi.org/10.1111/j.1467-937X.2008.00519.x>
- Darmansyah, D., Putra, R. E., & Hartati, S. (2020). Political dynasties and government performance in Indonesia: Evidence from audit opinion. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 35(2), 105–123. <https://doi.org/10.22146/jieb.55985>
- Farika, F., Yuliana, D., & Huda, N. (2023). Civic engagement and transparency in strengthening democratic governance in Indonesia. *Journal of Governance*, 8(1), 45–59. <https://doi.org/10.31506/jog.v8i1.17253>
- George, S., & Ponattu, D. (2019). Dynastic politics in South Asia: Electoral advantage or democratic deficit? *Asian Journal of Comparative Politics*, 4(3), 247–266. <https://doi.org/10.1177/2057891118819184>
- Hidayat, S. (2021). Political dynasties and local governance in Indonesia: The challenge of bureaucratic reform. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 69–89. <https://doi.org/10.1177/18681034211002670>
- Hutcheson, D. S., & Semenova, E. (2019). Political recruitment and dynasties in Russia. *Europe-Asia Studies*, 71(1), 25–47. <https://doi.org/10.1080/09668136.2018.1541204>
- IAKSS. (2024). *Dinasti politik dan birokrasi Indonesia: Kajian akademik*. Jakarta: Indonesian Association for Knowledge in Social Sciences. [Tanpa DOI – laporan kebijakan]
- Kopecký, P., Scherlis, G., Panizza, F., & Spirova, M. (2016). Party patronage in contemporary democracies: Results from an expert survey in 22 countries. *European Journal of Political Research*, 55(1), 416–431. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12135>
- Mendoza, R. U., Beja, E. L., Venida, V. S., & Yap, D. B. (2012). Inequality in democracy: Insights from an empirical analysis of political dynasties in the 15th Philippine Congress.

-
- Philippine Political Science Journal, 33(2), 132–145.
<https://doi.org/10.1080/01154451.2012.734093>
- MKR Indonesia. (n.d.). Fenomena politik dinasti di Indonesia. Retrieved from <https://mkrindonesia.org/politik-dinasti>
- Nevy Ramadhani, N. (2024). Masa jabatan, dinasti politik, dan demokrasi lokal di Indonesia. *Jurnal Politik*, 10(1), 33–47. <https://doi.org/10.7454/jp.v10i1.765>
- Nigro, L. G., Nigro, F. A., & Kellough, J. E. (2014). *The new public personnel administration* (7th ed.). Cengage Learning.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Prianto, A. (2016). Kualitas kepemimpinan politik dalam demokrasi lokal: Kajian standar kompetensi calon kepala daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 87–101. <https://doi.org/10.24905/jip.2.1.2016.87-101>
- Purwaningsih, T. (2015). Dinasti politik dalam demokrasi lokal: Studi kasus Pilkada. *Jurnal Politik*, 1(2), 183–204. <https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.22>
- Querubin, P. (2016). Family and politics: Dynastic persistence in the Philippines. *Quarterly Journal of Political Science*, 11(2), 151–181. <https://doi.org/10.1561/100.00014161>
- Scott, J. C. (1972). Patron-client politics and political change in Southeast Asia. *American Political Science Association*. <https://doi.org/10.2307/1956857>
- Sembiring, A., & Simanihuruk, T. (2018). Desentralisasi, identitas, dan politik lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 4(1), 44–58. <https://doi.org/10.21009/jipp.041.04>
- Susanti, R. (2017). Demokrasi substantif dan tantangan politik dinasti di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 5(2), 99–114. <https://doi.org/10.15294/jdp.v5i2.18753>
- Sutisna, A. (2017). Politik dinasti dan implikasinya terhadap pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(1), 21–32. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v6i1.9467>
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. University of California Press.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139017887>
- World Bank. (1992). *Governance and development*. Washington, DC: World Bank. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/604951468739447676/governance-and-development>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.